

# PENOLAKAN HUNGARIA ATAS SANKSI EKONOMI UNI EROPA TERHADAP RUSIA PADA TAHUN 2022

Baiq Mulhimmah Yayang Windari<sup>1</sup>, Lalu Puttrawandi Karjaya<sup>2</sup>, Kurnia Zulhandayani Rizki<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

<sup>2</sup>Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

<sup>3</sup>Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia  
yayangwdr@gmail.com

## ABSTRACT

*This study aims to analyze the reasons for Hungary's refusal of the European Union's economic sanctions against Russia in 2022. Hungary prefers the option of Rejecting sanctions and continuing to import gas from Russia with a deadline of 2023 and can still make efforts to refuse before and after that deadline, compared by agreeing to sanctions with relaxation until 2024, or agreeing to sanctions and implementing them and accepting alternative options to replace Russian gas supplies. In this study used a qualitative approach that is useful for describing, exploring and understanding social or humanitarian problems.*

*This study uses Rational Choice Theory as an analytical tool, to explain Hungary's behavior as a country that rejects EU decisions that has an established decision-making mechanism, and a supranational organization that will definitely guarantee the welfare of its member countries when implementing a decision taken. Hungary's refusal behavior can be said to be the right choice, seeing the transitive preferences that Hungary has based on its advantages and disadvantages, meaning that Hungary has managed to take advantage of the situation and the refusal to get the maximum possible profit, so that Hungary can be said to be a rational unitary actor.*

**Keywords:** Hungary, Economic Sanctions, European Union, Russia

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan penolakan Hungaria atas sanksi ekonomi Uni Eropa terhadap Rusia tahun 2022. Hungaria lebih memilih pilihan Menolak sanksi dan tetap mengimpor gas dari Rusia dengan batas waktu akhir tahun 2023 dan masih dapat melakukan upaya penolakan sebelum dan sesudah batas waktu tersebut, dibandingkan dengan menyetujui sanksi dengan relaksasi hingga tahun 2024, atau menyetujui sanksi dan menerapkannya serta menerima opsi alternatif pengganti pasokan gas Rusia. Pada penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif yang berguna untuk mendeskripsikan, mengeksplorasi dan memahami masalah sosial atau kemanusiaan.

Penelitian ini menggunakan Teori Pilihan Rasional atau sebagai alat analisis, untuk menjelaskan perilaku Hungaria sebagai sebuah negara yang menolak keputusan Uni Eropa yang memiliki mekanisme pengambilan keputusan yang mapan, dan sebuah organisasi supranasional yang pasti akan menjamin kesejahteraan negara anggotanya saat menerapkan sebuah keputusan yang diambil. Perilaku penolakan Hungaria dapat dikatakan merupakan pilihan yang tepat, melihat adanya preferensi transistif yang dimiliki Hungaria berdasarkan keuntungan dan kerugiannya, artinya Hungaria telah berhasil memanfaatkan situasi dan penolakan tersebut demi mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin, sehingga Hungaria dapat dikatakan sebagai aktor kesatuan yang rasional.

**Kata Kunci:** Hungaria, Sanksi Ekonomi, Uni Eropa, Rusia

## PENDAHULUAN

Pada Kamis 24 Februari 2022 Rusia melakukan penyerangan pada Ukraina dengan alasan membela separatistis di timur negara tersebut. Hal ini mendapat perhatian dari dunia internasional, Amerika Serikat kemudian mengklaim bahwa Rusia jelas-jelas telah melakukan pelanggaran terhadap hukum internasional karena Ukraina merupakan anggota PBB yang berarti negara tersebut adalah negara yang merdeka dan berdaulat.(Aida, 2022)

Pihak Barat kemudian kembali menegaskan sanksi yang akan dijatuhkan terkait serangan tersebut. Ursula Von Der Leyen, Chief European Commission Uni Eropa mengingatkan bahwa sanksi tersebut merupakan sanksi yang berkaitan dengan ekonomi, sistem keuangan, dan perbankan yang menargetkan sektor strategis yang dimiliki ekonomi Rusia dengan memblokir akses mereka terhadap teknologi dan pasar yang menjadi kunci ekonomi Rusia.(“Uni Eropa Sepakat Jatuhkan Sanksi Ekonomi Ke Rusia,” 2022)

Sanksi ini kemudian menjadi sanksi terbesar yang pernah dijatuhkan Uni Eropa pada sebuah negara, mengingat sanksi ini akan membatasi akses pasar keuangan Rusia, diprediksi menaikkan inflasi Rusia dan menghentikan akses material yang dibutuhkan sektor minyak bumi Rusia. Selain itu pelarangan impor minyak, gas alam, dan sumber energi lainnya yang berasal dari Rusia ditetapkan oleh AS pada hari Selasa, 08 Maret 2022. Hal ini kemudian dilanjutkan oleh Inggris sebagai salah satu negara di kawasan Eropa dengan rencananya untuk menyetop impor migas dari Rusia secara bertahap. Wakil PM Rusia kemudian merespon hal tersebut dengan mengancam akan memotong pasokan gas ke Eropa jika negara-negara Barat menjatuhkan sanksi impor energi, dan memperingatkan bahwa sanksi ini dapat berdampak melonjaknya harga minyak diatas \$300 per barel. Oleh sebab itu Presiden Prancis Emmanuel Macron mengajak negara-negara Eropa untuk bergabung menjadi kekuatan besar yang lebih mandiri pada bidang energi, mengingat berdasarkan data Badan Energi Internasional hampir setengah jumlah ekspor minyak Rusia ditujukan ke Eropa.(Asmarini, 2022)

Meskipun begitu terdapat negara anggota Uni Eropa yang menolak pemberian sanksi tersebut yaitu Hungaria dan Jerman. Pada awal penjatuhan sanksi, Jerman juga sempat menolak memberikan sanksi ini pada Rusia karena Jerman merupakan negara Eropa dengan jumlah pembelian terbesar bagi minyak Rusia hingga mencapai 550.000 barel per hari (bph) atau sebanyak 32% dari total impor minyak Jerman pada 2021, berdasarkan data dari *International Energy Agency*.(Asmarini, 2022)

Namun masyarakat Jerman menyuarakan pendapat agar pemerintah tidak menghiraukan kepentingan ekonomi dan mengedepankan sikap moral, yang mana masyarakat Jerman berpikir bahwa jika Jerman tidak menuruti sanksi tersebut, negara ini telah membantu Rusia pada pembiayaan penyerangan terhadap Ukraina. Selain itu setelah AS dan Inggris memberlakukan larangan migas Rusia, tekanan pada pemerintah Kanselir Jerman Olaf Scholz dan anggota G7 lainnya meningkat untuk mengikuti langkah kedua negara tersebut.(Detikcom, 2022)

Berbeda halnya dengan Jerman, Hungaria tetap menolak sanksi tersebut. Pasalnya Hungaria telah melakukan impor gas dari Rusia sejak tahun 1964,(*Druzhba Pipeline*, n.d.) mengingat hubungan diplomatik kedua negara sudah terjalin sebelum bubarnya Uni Soviet walau mengalami pasang surut. Kemudian secara resmi hubungan antara Hungaria dan Rusia dimulai kembali pada masa pemerintahan Viktor Orban, yang ditandai dengan

penandatanganan hubungan bilateral yang sangat penting bagi Hungaria yaitu perjanjian untuk memperpanjang pembangkit listrik tenaga nuklir di negara tersebut.(Végh, 2015)

Selain itu Hungaria membuat perjanjian pasokan gas jangka panjang dengan perusahaan raksasa energi Rusia Gazprom pada Agustus 2021, yang artinya perjanjian ini telah ada sebelum penyerangan berlangsung. Perjanjian tersebut berisi persetujuan Rusia untuk mengirim 4,5 miliar meter kubik gas alam per tahun selama 15 tahun ke depan ke Hungaria dan tidak menggunakan rute melewati Ukraina. Hal tersebut membuat Hungaria lebih tertarik pada resolusi damai sebagai jalan keluar permasalahan Rusia dan Ukraina.(“Menguak Alasan Jerman-Hungaria Tolak Jatuhkan Sanksi Ke Rusia,” 2022)

Pada keanggotaan Uni Eropa, keputusan kebijakan luar negeri dan keamanan sebagian besar memerlukan persetujuan semua negara Uni Eropa. Kaitanya dengan penjatuhan sanksi ekonomi pada Rusia, suara dari Uni Eropa harus bulat sehingga sanksi yang ada dapat diadopsi atau diterapkan secara resmi. Hal ini juga karena mekanisme pengambilan keputusan di Uni Eropa telah mapan, yaitu konsekuensi atas pengambilan keputusan yang ada telah diperhitungkan dan dapat dipertanggungjawabkan.(*Foreign and Security Policy*, n.d.)

Seperti dalam kasus penolakan yang dilakukan Hungaria atas keputusan penjatuhan sanksi ekonomi ke Rusia pada tahun 2022, Uni Eropa memberikan beberapa pilihan alternatif pada negara anggotanya yang bergantung pada migas Rusia sebelum adanya sanksi ekonomi yang melarang impor migas dan energi dari negara tersebut.(“Factbox: Europe’s Alternatives If Russia Shuts off Gas Supply,” 2022) Ketika sebuah negara kemudian tidak memiliki ketidakselarasan dengan Uni Eropa, maka negara tersebut akan dikenakan penangguhan hak-hak tertentu yang telah didapatkan dari statusnya sebagai anggota tetap Uni Eropa, dikarenakan tidak terdapat mekanisme pemecatan anggota pada Uni Eropa.(*Treaty on European Union / Maastricht Treaty*, n.d.)

Ditinjau dari seberapa besar pengaruh Hungaria pada Uni Eropa, sehingga negara tersebut sangat berani untuk menentang penjatuhan sanksi ekonomi terhadap Rusia secara konsisten, Hungaria tentu tidak bisa dibandingkan dengan Jerman, Perancis, dan Italia. Bahkan pada dana kontribusinya untuk Uni Eropa Hungaria menempati peringkat ke 18 dari 27 negara anggota.(*Amount Contributed to the Budget of the European Union in 2020, by Member State*, 2021) Hungaria tidak memiliki power yang cukup besar untuk secara khusus menolak sanksi yang akan diadopsi oleh Uni Eropa, yang mana Uni Eropa merupakan organisasi supranasional yang menekankan adanya keselarasan pada pengambilan keputusan kebijakan luar negeri setiap negara anggotanya, sesuai dengan yang terdapat pada *Treaty on European Union* atau yang dikenal sebagai *Maastricht Treaty*.(*Founding Agreements*, n.d.)

## TINJAUAN PUSTAKA

Pertama, penelitian dengan judul “Embargo Ekonomi sebagai Strategi Konfrontasi Uni Eropa Terhadap Rusia pada Masa Konflik Ukraina 2013-2015” oleh Ummu Ro’iyatu Nahdliyati Millati Hanifah. Penelitian ini membahas mengenai embargo ekonomi yang dilakukan Uni Eropa terhadap Rusia, dan bertujuan untuk menjelaskan alasan mengapa embargo tersebut dilakukan dengan menggunakan teori *foreign policy strategy* dan konsep *energy security*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksplanatif dan pendekatan penelitian kualitatif, serta teknik pengumpulan data studi kepustakaan.(Hanifah, 2017)

Penelitian oleh Hanifah, kemudian menjelaskan bahwa kebijakan embargo ekonomi yang dilakukan oleh Uni Eropa terhadap Rusia tersebut merupakan strategi konfrontasi Uni Eropa terhadap Rusia dengan dua alasan yang mendasarinya yaitu, kapabilitas Uni Eropa yang dirasa lebih tinggi daripada Rusia serta posisi Rusia yang dianggap sebagai ancaman oleh Uni Eropa. Penelitian oleh Hanifa ini kemudian membantu menjelaskan bagaimana posisi Rusia pada sudut pandang Uni Eropa, dan bagaimana Uni Eropa melihat kekuatannya jika dibandingkan dengan Rusia. Sehingga hal tersebut dapat memunculkan kebijakan embargo ekonomi Uni Eropa terhadap Rusia.

Kedua, penelitian dengan judul “Penolakan Yunani pada Perpanjangan Sanksi Uni-Eropa Terhadap Rusia Tahun 2014-2015” oleh Akbar Azmi. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui alasan Yunani menolak perpanjangan sanksi Uni Eropa terhadap Rusia, dengan menggunakan Konsep Kebijakan Luar Negeri yang dikemukakan oleh Alex Mintz dengan membagi analisa tersebut ke pada faktor ekonomi dan faktor politik, selain itu terdapat penggunaan Teori Keamanan Energi menurut Carlos Pasqual untuk memperpadat analisis faktor ekonomi. Penelitian oleh Akbar Azmi ini kemudian memilih menggunakan pendekatan kualitatif dengan objek negara dan menggunakan data sekunder.(Azmi, 2016)

Penelitian ini kemudian memenuhi tujuannya dengan menyimpulkan bahwa terdapat beberapa alasan kuat mengapa Yunani menolak perpanjangan sanksi Uni Eropa terhadap Rusia hingga 2016. Pada faktor ekonomi, ekspor Yunani mengalami kerugian akibat menurunnya perdagangan pada bidang pertanian. Keamanan energi pada sektor migas yaitu gas alam juga terancam akibat sanksi Uni Eropa terhadap Rusia yang kemudian melemahkan energi Yunani dapat dilihat melalui impor Yunani dari Rusia. Selain itu pada faktor politik, opini masyarakat Yunani melalui Polling secara mayoritas menolak perpanjangan sanksi Uni Eropa terhadap Rusia.(Azmi, 2016)

Ketiga, penelitian dengan judul “Penolakan Serbia terhadap Himbauan Uni Eropa Untuk Turut Menjatuhkan Sanksi ke Rusia Tahun 2014-2018” oleh Euftrat Kamil Kahar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan Serbia menolak himbauan Uni Eropa untuk ikut menjatuhkan sanksi ke Rusia sebagai respon terhadap aneksasi Crimea. Serbia sebagai negara kandidat anggota Uni Eropa memiliki kewajiban untuk mencocokkan kebijakan luar negerinya dengan kebijakan Uni Eropa justru memilih untuk menolak penjatuhan sanksi tersebut.(Kahar, 2019)

Penelitian ini mencoba menjelaskan perilaku penolakan tersebut menggunakan Teori Konstruktivisme, yang menjelaskan kebijakan luar negeri suatu negara sebagai aktor internasional melalui peran identitas. Pada penelitian oleh Euftrat Kamil Kahar ini, teori tersebut kemudian berhasil menjelaskan bahwa penolakan Serbia terhadap himbauan Uni Eropa untuk menjatuhkan sanksi ke Rusia tahun 2014-2018 dipengaruhi oleh identitas yang dimiliki Serbia. Identitas yang dimaksud adalah identitas Slavia yang memosisikan Rusia sebagai saudara 69 Slavia mereka, yang mengakibatkan adanya kepentingan nasional Serbia untuk mempertahankan hubungan dekat dengan Rusia.

Keempat, penelitian dengan judul “Penolakan Turki terhadap Himbauan Uni Eropa Untuk Turut Menjatuhkan Sanksi ke Rusia Pada Tahun 2014” oleh Meisarah Marsa. Penelitian ini membahas alasan penolakan Turki terhadap himbauan Uni Eropa untuk turut menjatuhkan sanksi ke Rusia pada tahun 2014. Berdasarkan hasil analisis menggunakan perspektif *Rational Actor Model* dan Konsep *National Interest*, kebijakan penolakan sanksi oleh Turki memberikan

sejumlah keuntungan bagi Turki seperti peluang kerjasama gas baru antara Rusia dan Turki, peningkatan ekspor pangan Turki ke Rusia, dan peluang mediator bagi Turki pada krisis Krimea. Selain itu Turki juga dapat terhindar dari kerugian fatal yang dapat mengancam hubungan ekonomi dan geopolitik dengan Rusia. (Marsa, 2016)

Pada penelitian ini posisi Turki adalah non-anggota Uni Eropa, namun sudah menjadi kandidat. Alasan penolakan yang dilakukan Turki mirip dengan alasan penolakan yang dilakukan Hungaria yaitu kerjasama gas dengan Rusia, meskipun kedua negara tetap memiliki faktor-faktor penolakan lain namun teori yang digunakan sebagai alat analisis perilaku penolakan yang ada hampir sama, yang mana pada penelitian oleh Marsa menggunakan perspektif *Rational Actor Model* yang berasal dari Teori Pilihan rasional. Sehingga penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk melihat bagaimana posisi sebuah negara sebagai *rational unitary actor*, dan dapat direfleksikan pada Hungaria pada penolakannya atas sanksi ekonomi Uni Eropa terhadap Rusia tahun 2022.

Kelima, penelitian dengan judul “Konsistensi Kebijakan Polandia terhadap Sanksi Uni Eropa terhadap Rusia pada tahun 2014” oleh Vanada Hanindita Anjani. Penelitian ini membahas mengenai terjadinya krisis di Ukraina pada tahun 2014, dan keamanan kawasan Eropa Timur terganggu oleh ancaman Rusia. Uni Eropa kemudian memberikan sanksi terhadap Rusia atas hal tersebut namun tidak membuat Rusia mundur dari kebijakannya menganeksasi Krimea. Rusia kemudian memberlakukan embargo terhadap produk pangan Uni Eropa yang menyebabkan kerugian pada negara-negara Uni Eropa yang menjalin kerjasama ekspor pangan dengan Rusia, salah satunya Polandia. Polandia mengalami kerugian pada sektor agrikulturnya, selain itu suplai gas yang berasal dari Rusia juga dipotong dan semakin mengganggu kondisi ekonomi Polandia. Adanya embargo tersebut kemudian membuat negara-negara Uni Eropa mulai mengalami pergeseran terhadap dukungan atas sanksi yang diberikan pada Rusia.(Anjani, 2017)

Penelitian oleh Anjani ini kemudian mencoba untuk menjelaskan alasan Polandia untuk tetap mendukung sanksi meskipun mengalami kerugian akibat embargo. Untuk menjelaskan alasan Polandia tetap mendukung kebijakan Uni Eropa, penelitian ini menggunakan teori penggunaan sanksi ekonomi sebagai instrumen kebijakan luar negeri, dengan hipotesis bahwa alasan yang melatarbelakangi dukungan Polandia terhadap sanksi Uni Eropa terhadap Rusia adalah sebagai *primary objectives* yaitu untuk mengembalikan keamanan wilayah Polandia, yang kemudian mempengaruhi *secondary objectives* mengenai kondisi Polandia yang bergantung pada keamanan Eropa Timur.

## **METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif yang berguna untuk mendeskripsikan, mengeksplorasi dan memahami masalah sosial atau kemanusiaan. Pendekatan ini menggunakan strategi pendekatan dan metode pengumpulan data, analisis dan penafsiran. Pendekatan kualitatif mengandalkan data teks dan gambar, serta memiliki langkah-langkah unik pada analisis data dan memanfaatkan beragam strategi penyelidikan.(Creswell, 2009) Penggunaan pendekatan penelitian kualitatif ini memiliki tujuan menjelaskan fenomena dengan detail, melalui pengumpulan data yang rinci. Pada penelitian kualitatif, semakin pada dilakukan penelitian dapat dikatakan kualitas penelitian yang dilakukan semakin baik. Penelitian kualitatif tidak terlalu fokus pada angka atau nilai pada pengukuran variabelnya.

## KERANGKA PEMIKIRAN

### TEORI PILIHAN RASIONAL

Setiap negara memiliki berbagai cara untuk memenuhi kepentingan nasionalnya melalui instrumen kebijakan luar negeri. Untuk memenuhi kepentingan tersebut, negara sebagai aktor yang rasional harus tetap berupaya untuk memilih pilihan yang dapat memaksimalkan *benefit* dan meminimalkan *cost* yang diterima. Untuk dapat mengetahui *benefit* dan *cost* yang diterima oleh suatu negara, pada hal ini terkait Hungaria yang menolak untuk memberikan sanksi ekonomi pada Rusia atas invasi yang dilakukan terhadap Ukraina di tahun 2022, maka penelitian ini akan menggunakan Teori Pilihan Rasional atau *Rational Choice Theory* sebagai alat analisis, untuk menjelaskan perilaku Hungaria sebagai sebuah negara yang menolak keputusan Uni Eropa yang memiliki mekanisme pengambilan keputusan yang mapan, dan sebuah organisasi supranasional yang pasti akan menjamin kesejahteraan negara anggotanya saat menerapkan sebuah keputusan yang diambil. Teori Pilihan Rasional pada Hubungan Internasional telah terbentuk di awal tahun 1960-an, teori ini diartikan sebagai instrumen tentang maksud, tujuan, atau pilihan dari tujuan terarah suatu aktor. (Sorensen, 2009)

Pada dasarnya, setiap situasi pilihan dapat menghasilkan rekomendasi yang disukai oleh semua pihak, karena dengan demikian dapat dicapai hasil yang diinginkan. Menurut William N. Dunn, dalam bukunya yang berjudul “**Pengantar Analisis Kebijakan Publik**” terdapat dasar-dasar rasional ganda yang mendasari sebagian besar pilihan-pilihan kebijakan, yaitu Rasionalitas teknis, Rasionalitas Ekonomis, Rasionalitas legal, Rasionalitas sosial, dan Rasionalitas substantif. Karakteristik utama dari berbagai bentuk rasionalitas ini adalah, semuanya melakukan pemilihan secara bernalar tentang perlunya mengambil arah tindakan tertentu untuk memecahkan masalah kebijakan. Namun bentuk-bentuk rasionalitas ini sulit untuk terealisasi secara penuh dalam kebanyakan situasi pembuatan kebijakan. Agar menjadi rasional dan komperhensif pada saat yang bersamaan, suatu pilihan harus memenuhi kondisi sebagai berikut, inilah yang disebut sebagai teori rasional-komperhensif dalam pembuatan keputusan: (Dunn, 2003)

Pembuat keputusan individual atau kolektif harus mengidentifikasi masalah kebijakan yang diterima sebagai konsensus oleh semua pelaku kebijakan yang relevan.

- (1) Pembuat keputusan individual atau kolektif harus mendefinisikan dan mengurutkan secara konsisten tujuan dan sasaran yang pencapaiannya mencerminkan pemecahan masalah.
- (2) Pembuat keputusan individual atau kolektif harus mengidentifikasi semua pilihan kebijakan yang dapat memberi kontribusi terhadap pencapaian masing masing sasaran.
- (3) Pembuat keputusan individual atau kolektif harus mengidentifikasi semua konsekuensi yang akan dihasilkan oleh seleksi setiap alternatif.
- (4) Pembuat keputusan individual atau kolektif harus membandingkan setiap pilihan dalam hal akibatnya terhadap pencapaian setiap tujuan dan sasaran.
- (5) Pembuat keputusan individual atau kolektif harus memilih alternatif yang memaksimalkan pencapaian tujuan.

Teori pilihan rasional ini kemudian digunakan pada Hubungan Internasional oleh Charles W. Kegley dan Eugene R. Witkopff, dalam buku berjudul “World Politics: Trend and Transformation”

terdapat beberapa langkah bagaimana menentukan kebijakan yang rasional yaitu:(Wittkopf, 1989)

- (1) **Problem recognition and definiton**, ketika para pembuat kebijakan merasakan munculnya permasalahan eksternal, mereka mencoba untuk mendefinisikan perbedaan karakteristiknya secara objektif. Objektivitas membutuhkan informasi lengkap tentang tindakan, motivasi dan kemampuan aktor lain serta karakter lingkungan dan tren global didalamnya. Idealnya pencarian informasi akan lengkap, dan semua fakta relevan terkait permasalahan yang ada akan terkumpul.
- (2) **Goal Selection**, pembuat kebijakan atau aktor rasional harus menentukan bagaimana mereka ingin menyelesaikan permasalahan yang ada. Ini memang jauh dari kata mudah, mengingat hal tersebut harus diurutkan berdasarkan hasil mana yang lebih disukai, selain itu tujuan nasional yang ada bisa jadi memiliki perbedaan. Namun untuk menentukan prioritas secara rasional tujuan yang ada harus diidentifikasi dan diurutkan dalam hierarki dari yang paling disukai hingga yang paling tidak disukai.
- (3) **Identification of alternatives**, rasionalitas mensyaratkan kompilasi daftar lengkap dari opsi kebijakan yang ada termasuk *cost* dan *opportunity* terkait alternatif yang dapat dipilih untuk mewujudkan tujuan dalam hierarki preferensi.
- (4) **Choice**, pada akhirnya rasionalitas hanya akan memilih satu pilihan yaitu yang memiliki prospek terbaik untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk tujuan ini pembuat keputusan harus menganalisis *cost* dan *benefit* dengan dipandu oleh prediksi yang akurat tentang peluang keberhasilan dari setiap pilihan.

Pada intinya, rasionalitas memerlukan perilaku yang diarahkan pada tujuan yang ditunjukkan ketika individu yang menanggapi peristiwa internasional menggunakan informasi terbaik yang tersedia, dan memilih kemungkinan tanggapan alternatif yang paling mungkin untuk memaksimalkan tujuannya.(Wittkopf, 1989) Untuk memudahkan operasionalisasi teori, maka penelitian ini menggunakan turunan dari Teori Pilihan Rasional sebelumnya dengan teori yang diimpelentasikan oleh Stephen M. Waltz. Waltz menjelaskan Teori Pilihan Rasional secara rinci pada jurnal berjudul '**Rigor or Rigor Mortis? Rational Choice and Security Studies**'. Waltz menyatakan bahwa:(Walt et al., 2011)

- (1) Teori Pilihan Rasional bersifat individualistis, yaitu hasil sosial dan politik dipandang sebagai produk kolektif dari pilihan individu atau sebagai produk pilihan yang dibuat oleh *unitary actors*.
- (2) Teori Pilihan Rasional mengasumsikan bahwa setiap aktor berusaha untuk memaksimalkan "*subjective expected utility*"nya, menggunakan seperangkat preferensi tertentu dan serangkaian kemungkinan pilihan yang tetap, para pelaku akan memilih hasil yang memberikan manfaat terbesar yang diharapkan.
- (3) Spesifikasi preferensi aktor tunduk pada batasan tertentu yaitu, preferensi aktor harus lengkap, preferensi harus transitif contohnya jika A lebih disukai daripada B dan B daripada C, maka A lebih disukai daripada C.

Penggunaan Teori Pilihan Rasional, akan membantu peneliti untuk menjawab mengapa Hungaria memilih melakukan penolakan tersebut, mengingat posisinya sebagai anggota resmi Uni Eropa, yang memiliki mekanisme pengambilan kebijakan luar negeri yang telah mapan. Jika dikatakan posisi Hungaria pada keanggotaan Uni Eropa dapat terancam, karena Hungaria adalah anggota tetap dari Uni Eropa yang seharusnya menyamakan suara, pada pengambilan

keputusan luar negeri seperti yang tercantum pada TEU, hal itu tidak akan terjadi karena pada organisasi ini tidak ada prosedur pemecatan negara anggota, yang ada hanya penangguhan hak-hak tertentu. (*Treaty on European Union / Maastricht Treaty*, n.d.)

Keputusan Hungaria sebagai *unitary actor* diambil berdasarkan kepentingan nasional negaranya, yang mana kepentingan nasional tersebut meliputi kepentingan sosial dan kepentingan politik, yang didasarkan pada urgensi konsumsi gas Hungaria. Alternatif yang ditawarkan Uni Eropa seperti penggunaan kembali batubara untuk sementara dan mengakses sumber gas baru yang berasal dari Laut Utara Norwegia, tidak membuat Hungaria tertarik untuk menyetujui sanksi tersebut karena setiap opsi yang ditawarkan oleh Uni Eropa memiliki kekurangan yang menurut Hungaria tidak akan memberikan hasil yang diharapkan, sedangkan kerjasama Hungaria dengan Rusia memberikan bahkan lebih dari itu. Maka dari itu Teori Pilihan Rasional adalah perspektif yang tepat untuk melihat alasan penolakan Hungaria atas sanksi ekonomi Uni Eropa terhadap Rusia pada tahun 2022 dengan membuat keputusan yang masuk akal dan sesuai logika mengenai bagaimana negara mengambil keputusan. (Hartono, n.d.)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **HUBUNGAN KERJASAMA RUSIA HUNGARIA**

Hubungan Hungaria dengan Uni Soviet terbilang sudah terjalin sejak lama bahkan setelah Perang Dunia I, namun hubungan yang terjalin pada masa itu hingga setelah bubarnya Uni Soviet sangat rentan sehingga banyak mengalami konflik, dikarenakan kondisi perpolitikan dunia pada masa itu. Bubarnya Uni Soviet yang menyisakan Federasi Rusia kemudian memulai babak baru pada hubungannya dengan Hungaria, hubungan kerjasama Hungaria-Rusia secara resmi dimulai pada tahun 2010 di masa pemerintahan Viktor Orban, kebijakan Hungaria terkait dimulainya hubungan Hungaria-Rusia ini disebut sebagai kebijakan "*Eastern Opening*". Inti dari pengambilan kebijakan ini oleh Viktor Orban adalah keinginan untuk memajukan hubungan ekonomi Hungaria dengan dunia non-barat yaitu seperti Amerika dan Eropa, sehingga dapat mengimbangi ikatan ekonomi Hungaria yang kuat dengan Barat. (Végh, 2015)

#### ***Kerjasama Energi***

Diantara negara-negara yang dijadikan target kebijakan "*Eastern Opening*", hubungan antara Hungaria dan Rusia dengan cepat lebih menonjol dibandingkan hubungan Hungaria dengan negara lain. Kedekatan hubungan antara kedua negara ini kemudian secara resmi ditandai dengan penandatanganan Hungaria dalam sebuah kerjasama bilateral jangka panjang pada 14 Januari 2014 yaitu, perjanjian untuk memperpanjang satu-satunya pembangkit listrik tenaga nuklir di Hungaria. Menurut kerjasama tersebut, *State Atomic Energy Corporation Rosatom* yaitu perusahaan teknologi nuklir nasional Rusia akan membangun dua reaktor baru di Hungaria atas kredit Rusia, yang mana berarti Hungaria telah berhutang budi pada Rusia. (Végh, 2015)

Sebenarnya Kerjasama Hungaria-Rusia dibidang energi atom telah terjalin sejak tahun 1955 sebelum Uni Soviet runtuh, dengan penandatanganan perjanjian bilateral yang mendirikan Reaktor Riset di Budapest atau *Budapest Research Reactor* (BRR), sebuah reaktor rancangan Soviet tipe *Water Water Energetic Reactor* (VVER/WWER), namun reaktor ini menjadi kritis pada tahun 1959. Setelah itu terjadi kesepakatan antar pemerintah Hungaria dan Uni Soviet untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir pertama di Hungaria yang ditandatangani pada tanggal 28 Desember 1966, dan situs Paks 100km di selatan Budapest dipilih sebagai



lokasi pembangunan, reaktor kedua Hungaria kemudian dirancang dan dibangun antara tahun 1969 dan 1971. (*Cooperation with Hungary*, n.d.)

Setelah terjalin kesepakatan jangka panjang pada Januari 2014 tersebut, pada bulan berikutnya tepatnya pada 24 Februari 2014, Rusia melakukan ankesasi ke Krimea dan hal tersebut mendapatkan respon negatif dari Uni Eropa, yang mana Uni Eropa menerapkan sanksi terhadap Rusia yang mulai diterapkan pada 17 Maret 2014. Namun hal ini tidak menyebabkan hubungan Hungaria yang merupakan anggota Uni Eropa dan Rusia yang dijatuhkan sanksi oleh organisasi tersebut. Pada bulan desember ditahun yang sama *Join-stock Company (JSC)* Pengembang Reaktor Nuklir MVM Paks II yaitu bagian dari MVM Group yang merupakan perusahaan yang memegang sistem energi Hungaria, dan Perusahaan Teknik *Nizhny Novogorod Atomenergoproekt (NIAEP-ASE)* gabungan milik Rusia menandatangani tiga perjanjian implementasi untuk pembangunan PLTN Paks II. (*Cooperation with Hungary*, n.d.)

Perluasan PLTN Paks yang dibangun bersama oleh spesialis nuklir Soviet dan Hungaria, memiliki kepentingan strategis untuk keamanan energi Hungaria secara signifikan, karena pembangkit tersebut menyediakan lebih dari 50% listrik negara. Dua reaktor baru VVER-1200 generasi 3+ akan menggantikan unit yang ada, yang akan berhenti beroperasi antara tahun 2032 dan 2037. JSC Rusatom Service (anggota ROSATOM Group) dan MVM Paks Ltd, menandatangani perjanjian kerangka kerja untuk penyediaan peralatan dan suku cadang untuk pemeliharaan dan peningkatan empat unit PLTN Paks yang ada pada Oktober 2015. (*Cooperation with Hungary*, n.d.)

Ditahun 2021 pada bulan Agustus, Hungaria menjalin kerjasama jangka panjang dengan perusahaan gas raksasa Rusia Gazprom. Pada perjanjian kesepakatan ini Hungaria akan memasok gas dari Rusia selama 15 tahun dengan mengirim 4,5 miliar meter kubik gas alam per tahun ke Hungaria pada rute yang tidak melewati Ukraina. Perjanjian ini mulai berlaku pada bulan Oktober 2021 dengan opsi mengubah jumlah yang dibeli setelah 10 tahun. ("Menguak Alasan Jerman-Hungaria Tolak Jatuhkan Sanksi Ke Rusia," 2022)

Rute pemasokan gas ini adalah rute melalui pipa Turkstream yang mulai dibangun pada 2017 lalu, dan diresmikan pada tahun 2020, pipa Turkstream adalah pipa gas alam lepas pantai sepanjang 930km yang melintasi Laut Hitam untuk menghubungkan cadangan gas Rusia ke Turki dan Eropa Tenggara. Pipa ini dimulai di dekat kota pesisir Rusia Anapa dan mendarat di Wilayah Thrace di Turki. ("TurkStream Pipeline," n.d.) Sebelum adanya kesepakatan ini, Hungaria telah memasok gas melalui jalur pipa Druzhba yang rutenya melewati Ukraina, namun Hungaria menyadari bahwa diversifikasi rute pasokan merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga keamanan energi negaranya dan dapat mengembangkan sistem transmisi gas nasional. (Morrow, 2021)

Terbentuknya Pipa Druzhba diawali oleh keinginan negara-negara sekutu Uni Soviet yang tergabung dalam blok sosialis, untuk mengalirkan minyak mentah dari Soviet dan mengadakan pertemuan di Praha pada 10 Desember 1958. Konstruksi pipa kemudian dimulai pada tahun 1960, dan masing-masing pipa nantinya akan menjadi hak milik masing-masing negara. Pipa tersebut kemudian menelan biaya sebanyak 400 juta rubel, dengan penggalian lebih dari 15 juta meter kubik tanah untuk peletakan 730.000 ton pipa. Pipa Druzhba melintasi 45 sungai besar pada rutenya menuju Eropa Tengah, seluruh bagian pipa kemudian mulai dioperasikan pada Oktober 1964. (*Druzhba Pipeline*, n.d.)

Setelah terjalinya kesepakatan dengan perusahaan minyak Rusia Gazprom untuk memasok gas dalam jangka panjang, ditahun berikutnya tepatnya pada 24 Februari 2022 Rusia melakukan Invasi ke Ukraina. Atas adanya Invasi ini, negara-negara Barat khususnya AS dan Uni Eropa menjatuhkan sanksi ekonomi pada Rusia dengan tujuan menargetkan sektor vital Rusia yakni pasar modal dan migas. ("Uni Eropa Sepakat Jatuhkan Sanksi Ekonomi Ke Rusia," 2022) Adanya sanksi tersebut menyebabkan negara-negara anggota Uni Eropa yang memiliki tingkat ketergantungan tinggi terpaksa menerapkan sanksi, karena mereka harus bergabung menjadi satu kekuatan besar yang dapat melemahkan ekonomi Rusia. Namun memang selain karena Hungaria menolak untuk menerapkan sanksi tersebut, Hungaria dan beberapa negara lain di Eropa Tengah diberikan relaksasi selama beberapa waktu karena negara-negara pada kawasan tersebut tidak memiliki jalur laut dan terdapat banyak sektor pekerjaan yang membutuhkan pasokan migas. (Kate Abnett, 2022)

Sehingga, Hungaria kembali menandatangani kesepakatan dengan Rusia untuk pasokan gas tambahan pada 31 agustus 2022, yaitu pasca terjadinya invasi Rusia ke Ukraina dan penjatuhan sanksi ekonomi oleh Uni Eropa. Pada perjanjian tersebut Rusia akan mengirimkan hingga 5,8 juta meter kubik gas per hari ke Hungaria, diatas kuantitas kontrak yang sudah berlaku sebelumnya. ("Hungary Signs New Gas Deal with Gazprom," 2022)

### ***Kerjasama Ekonomi-Politik***

Selain urusan kerjasama di bidang energi yang terus berlangsung, aneksasi yang dilakukan Rusia pada Krimea membawa Putin mengunjungi Budapest pada awal tahun 2015, dengan persepsi baru Kremlin atas Hungaria. Presiden Rusia ini melihat Orban sebagai pemimpin *euroskeptic* yang dapat bermain di panggung Eropa dan berharap Hungaria dapat secara resmi mendorong pencabutan sanksi Uni Eropa pada saat itu. Namun disaat Orban menyatakan ketidaksukaanya terhadap sanksi Uni Eropa, baik Hungaria maupun negara-negara yang skeptis pada sanksi tersebut seperti Siprus, Italia, dan Yunani tidak bisa memblokir sanksi tersebut, karena setiap kali mereka menyuarkan hal tersebut di Uni Eropa, blok tersebut tidak mau mematahkan barisan dan menggunakan hak veto dibawah dorongan Jerman. Namun meskipun sanksi Uni Eropa atas aneksasi Krimea oleh Rusia masih diperpanjang dari tahun 2014 hingga saat terjadinya invasi Rusia ke Ukraina, namun hal tersebut tidak menyurutkan keharmonisan hubungan Hungaria dan Rusia. (*Timeline - EU Restrictive Measures against Russia over Ukraine*, n.d.)

Di tahun 2014, Hungaria bergabung dengan *International Investment Bank* (IIB) yang dipimpin oleh Rusia. (Kraemer, 2021) Pada 19 Februari tahun 2019, kantor pusat IIB dipindahkan dari Moskow ke Budapest, hal ini kemudian membuat heran Uni Eropa karena Hungaria memberikan kekebalan diplomatik secara penuh pada bank tersebut. Jika hukum Hungaria menetapkan otorisasi khusus untuk aktivitas tertentu, IIB harus memiliki kedudukan hukum, semua aset dan aktivitas bank akan kebal terhadap setiap aktivitas hukum, administrasi atau proses peradilan, kecuali bank melepaskan kekebalan ini. Staf IIB dan keluarga mereka akan menikmati kekebalan diplomatik penuh, dan Hungaria juga wajib memberikan kekebalan diplomatik kepada mereka yang berhubungan dengan bank. (Biro Marianna, 2019)

Selanjutnya pada 21 Februari 2019, delegasi Hungaria yang dipimpin oleh Menteri Keuangan Mihaly Varga, atas undangan Bank, mengunjungi kantor pusat *International Bank for Economic Cooperation* (IBEC) untuk membahas mengenai bergabungnya kembali Hungaria dengan IBEC sebagai anggota penuh, yang mana p[er]hal ini dianggap sebagai aktivitas yang

mengarah pada revitalisasi era soviet,(Kraemer, 2021) karena pada dasarnya IBEC merupakan Bank badan negara Rusia yang dulunya dibentuk berdasarkan perjanjian yang ditandatangani oleh Bulgaria, Hungaria, Jerman Timur, Mongolia, Polandia, Romania, Cekoslovakia, dan Uni Soviet pada bulan Oktober tahun 1963 untuk memfasilitasi kerjasama ekonomi diantara negara-negara anggota dan untuk mempromosikan perkembangan mereka, namun bubarnya Uni Soviet juga berdampak pada negara-negara ini, sehingga beberapa negara seperti Hungaria, Jerman Timur, Polandia, dan Cekoslovakia tidak lagi menjadi anggota.("International Bank for Economic Cooperation," n.d.)

Pada April 2021, Kementrian Luar Negeri Hungaria mengumumkan bahwa Hungaria selanjutnya akan menjadi negara anggota Uni Eropa pertama yang bergabung dengan *Eurasian Development Bank* (EDB) yang berbasis di Moskow,(Kraemer, 2021) yang mana EDB merupakan lembaga keuangan internasional yang didirikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi negara-negara anggotanya, memperluas hubungan perdagangan dan ekonomi diantara negara anggota tersebut, serta mendukung integrasi di Eurasia melalui investasi. Negara-negara anggota EDB hingga sebelum bergabungnya Hungaria adalah Armenia, Belarusia, Kazakstan, Republik Kyrgystan, Rusia, dan Tajikistan.(*Bank Profile*, n.d.)

#### SANKSI EKONOMI UNI EROPA TERHADAP RUSIA TAHUN 2022

Dalam kebijakan pengadopsian sanksi di Uni Eropa, terdapat mekanisme atau beberapa prosedur yang harus dilakukan terlebih dahulu untuk menerapkan sanksi secara resmi. Tindakan pembatasan ditetapkan dalam keputusan Common Foreign and Security Policy (CFSP) atau Dewan Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Bersama. Proposal dari sanksi tersebut kemudian dibuat oleh Perwakilan Tinggi Persatuan Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan. Langkah-langkah yang diusulkan kemudian diperiksa dan didiskusikan oleh badan persiapan Dewan yang relevan:(*Adoption and Review Procedure for EU Sanctions*, n.d.)

- Pihak kerja Dewan yang bertanggung jawab atas wilayah geografis tempat negara target berada (misalnya, Partai Kerja Eropa Timur dan Asia Tengah (COEST) untuk Ukraina atau Belarusia; Partai Kerja Mashreq/Maghreb untuk Suriah, atau badan persiapan lainnya)
- Kelompok Kerja Kelompok Foreign Relations Counsellors Working Party atau Kerja Konselor Hubungan Luar Negeri (RELEX)
- Jika diperlukan, Political and Security Committee atau Komite Politik dan Keamanan (PSC)
- The Committee of Permanent Representatives Panitia Wakil Tetap (COREPER II)

Keputusan tersebut kemudian diadopsi oleh Dewan dengan suara bulat. Jika Keputusan Dewan mencakup pembekuan aset dan/atau jenis sanksi ekonomi dan/atau keuangan lainnya, tindakan tersebut perlu diterapkan dalam peraturan Dewan. Setelah serangkaian pengakuan kemerdekaan atas wilayah Donetsk dan Luhansk yang merupakan wilayah dengan gerakan separatis dan penyerangan ke Ukraina pada hari kamis 24 Februari 2022, serta Rusia di klaim telah melakukan pelanggaran berat terhadap hukum Internasional karena telah menyerang negara berdaulat.(Aida, 2022) Berdasarkan hal tersebut Uni Eropa memberlakukan sanksi yang belum pernah dijatuhkan sebelumnya pada Rusia sebagai respon terhadap invasi Ukraina yang tidak beralasan dan tidak dapat dibenarkan pada saat itu. Sebenarnya Uni Eropa menambah putaran sanksi yang telah diberlakukan di Rusia sejak 2014 terkait aneksasi yang dilakukan

Rusia di Krimea dan tidak diterapkannya Perjanjian Minsk. Tujuan dari sanksi ekonomi adalah untuk memberikan konsekuensi berat pada Rusia atas tindakannya dan secara efektif menggagalkan kemampuan Rusia untuk melanjutkan serangan. (*EU Sanctions against Russia Explained*, n.d.)

### **Paket Sanksi Pertama**

Pada 23 Februari 2022, Dewan Uni Eropa menyepakati sanksi paket pertama untuk menanggapi keputusan Rusia yang mengakui bahwa wilayah Donetsk dan Luhansk yang dikuasai non-pemerintah di Ukraina sebagai entitas independen, dan keputusan selanjutnya untuk mengirim pasukan Rusia ke wilayah tersebut. (*Timeline - EU Restrictive Measures against Russia over Ukraine*, n.d.)

Paket sanksi yang disetujui meliputi *Satu*, sanksi yang ditergetkan terhadap 351 anggota Duma Negara Rusia (otoritas legislatif) yang memberikan suara pada 15 Februari sebagai dukungan pada Presiden Putin untuk mengakui kemerdekaan Donetsk dan Luhansk yang memproklamkan diri. Selain itu sanksi ini juga diberikan pada 27 individu dan entitas terkenal, yang telah berperan dalam merusak atau mengancam integritas teritorial, kedaulatan dan kemerdekaan Ukraina. *Dua*, Pembatasan hubungan ekonomi dengan wilayah Donetsk dan Luhansk yang tidak dikuasai pemerintah, dengan larangan impor barang dari wilayah Donetsk dan Luhansk, pembatasan perdagangan dan investasi yang terkait dengan sektor ekonomi tertentu, larangan untuk memasok layanan pariwisata, dan larangan ekspor untuk barang-barang dan teknologi tertentu. *Tiga*, pembatasan akses Rusia ke pasar modal dan keuangan serta layanan Uni Eropa, yang mana Dewan Uni Eropa memutuskan untuk memberlakukan larangan sektoral untuk membiayai Federasi Rusia, pemerintahannya, dan Bank Sentral. Uni Eropa bertujuan untuk membatasi pembiayaan kebijakan eskalasi dan agresif. (*EU Adopts Package of Sanctions in Response to Russian Recognition of the Non-Government Controlled Areas of the Donetsk and Luhansk Oblasts of Ukraine and Sending of Troops into the Region*, n.d.)

### **Paket Sanksi Kedua**

Pada tanggal 25 Februari 2022, Uni Eropa menjatuhkan sanksi paket kedua sebagai respon atas invasi Rusia ke Ukraina. Uni Eropa telah memutuskan untuk membekukan aset Vladimir Putin, Presiden Rusia, dan Sergey Lavrov, Menteri Luar Negeri Rusia. Selain itu, Uni Eropa juga memberlakukan tindakan pembatasan pada anggota Dewan Keamanan Nasional Rusia dan anggota Duma Negara Rusia yang tersisa. Kemudian di tanggal 28 Februari 2022, Uni Eropa telah menyetujui sanksi paket ketiga yang meliputi, larangan transaksi dengan Bank Sentral Rusia, paket dukungan €500 juta untuk membiayai peralatan dan pasokan ke angkatan bersenjata Ukraina, larangan penerbangan diatas wilayah udara Uni Eropa, dan akses ke bandara Uni fdccsdxEropa oleh maskapai Rusia, serta sanksi baru untuk tambahan 26 orang dan satu entitas. (*Timeline - EU Restrictive Measures against Russia over Ukraine*, n.d.)

### **Paket Sanksi Ketiga**

Pada tanggal 2 Maret 2022, Uni Eropa mengeluarkan paket sanksi ketiga yaitu, larangan SWIFT atau Society Worldwide Interbank Financial Telecommunication sehingga terjadi penutupan akses teknologi pasar, hingga pemblokiran Rusia dari sistem keuangan dunia, yang diberlakukan untuk tujuh bank Rusia, yang mana SWIFT merupakan penyedia layanan perpesanan keuangan khusus, yang digunakan untuk bertukar data keuangan. Uni Eropa telah mengecualikan tujuh bank Ruisa dari SWIFT. Ini akan memastikan bahwa bank-bank ini

terputus dari sistem keuangan internasional dan menghentikan kemampuan mereka untuk beroperasi secara global. Uni Eropa juga memperkenalkan larangan pada investasi, partisipasi, atau kontribusi pada proyek masa depan yang dibiayai bersama oleh Dana Investasi Langsung Rusia, menjual, emmasok, mentransfer, atau mengekspor uang kertas euro ke Rusia atau kepada orang atau badan hukum manapun di Rusia. (*Timeline - EU Restrictive Measures against Russia over Ukraine*, n.d.)

#### **Paket Sanksi Keempat**

Pada tanggal 15 Maret 2022, Uni Eropa memberlakukan paket sanksi keempat atas invasi yang dilakukan Rusia ke Ukraina, yaitu sanksi ekonomi dan individu yang meliputi larangan semua transaksi dengan badan usaha milik negara tertentu, larangan penyediaan layanan peringkat kredit untuk orang atau entitas Rusia manapun, dan larangan investasi baru di sektor energi Rusia. Dewan memperluas daftar orang-orang yang terkait dengan basis pertahanan dan industri Rusia, kemudian memberlakukan pembatasan ekspor yang lebih ketat terkait barang-barang penggunaan ganda, dan barang yang dapat berkontribusi pada peningkatan teknologi Rusia di sektor pertahanan dan keamanannya. Selain itu Uni Eropa juga membatasi perdagangan besi, baja, dan barang mewah, sanksi pada tambahan 15 individu dan 9 entitas. (*Timeline - EU Restrictive Measures against Russia over Ukraine*, n.d.)

#### **Paket Sanksi Kelima**

Di tanggal 8 April 2022, Uni Eropa mengadopsi paket sanksi kelima terhadap Rusia mengingat penyerangan Rusia yang terus berlanjut terhadap Ukraina, dan laporan kekejaman yang dilakukan oleh angkatan bersenjata Rusia di sejumlah kota Ukraina. Paket sanksi ini meliputi larangan impor batubara dan bahan bakar fosil padat lainnya yang berasal dari Rusia, pelarangan akses semua kapal Rusia di pelabuhan Uni Eropa, larangan operator transportasi darat Rusia dan Belarusia memasuki Uni Eropa, larangan impor barang lain seperti kayu, semen, makanan laut, dan minuman keras, larangan ekspor bahan bakar jet dan barang lainnya ke Rusia, dan larangan deposit ke *crypto-wallet*. (*Timeline - EU Restrictive Measures against Russia over Ukraine*, n.d.)

#### **Paket Sanksi Keenam**

Pada tanggal 30-31 Mei 2022, Uni Eropa menyetujui paket sanksi keenam terhadap Rusia. Paket sanksi tersebut akan mencakup minyak mentah, serta produk minyak bumi, yang dikirim dari Rusia ke negara-negara anggota Uni Eropa. Namun diberlakukan pengecualian sementara untuk minyak mentah yang dikirim melalui pipa. Para pemimpin Uni Eropa mendesak Dewan Uni Eropa untuk menyelesaikan dan mengadopsi sanksi baru tanpa penundaan. Pada tanggal 3 Juni paket sanksi keenam yang telah dibahas sebelumnya kemudian mulai diadopsi. Paket sanksi tersebut meliputi larangan impor minyak mentah dan produk minyak sulingan dari Rusia, dengan pengecualian terbatas, penambahan larangan SWIFT untuk tiga bank Rusia dan satu bank Belarusia, dan penangguhan penyiaran di Uni Eropa untuk tiga outlet milik negara Rusia lainnya. (*Timeline - EU Restrictive Measures against Russia over Ukraine*, n.d.)

Paket sanksi keenam inilah yang menuai pro-kontra dikalangan negara-negara anggota Uni Eropa, serta adanya penolakan dari beberapa negara anggotanya salah satunya Hungaria, mengingat tingkat ketergantungan Uni Eropa terhadap impor migas dari Rusia. Sebelum Rusia menginvasi Ukraina, Uni Eropa sangat bergantung pada sumber daya energi Rusia. Pada tahun 2021, negara-negara Uni Eropa mengimpor 155 miliar meter kubik gas Rusia, yang merupakan sekitar 45 persen dari total impor gas. Sebelumnya juga Rusia adalah pemasok minyak mentah

terbesar ke Uni Eropa yaitu sekitar 108,1 juta ton dan pemasok produk minyak bumi terbesar yang berjumlah sekitar 91 juta ton. Pada tahun 2021, negara-negara anggota Uni Eropa juga mengimpor 51,4 juta ton batu bara dari Rusia, yang berjumlah hampir setengah dari jumlah total impor batu bara Uni Eropa. Bahan Bakar Rusia menggerakkan pengoperasian 18 blok nuklir di Uni Eropa, enam di Republik Ceko, masing-masing empat di Hungaria dan Slovakia, dan masing-masing dua di Finlandia dan Bulgaria. (Kardas, 2023)

### **Paket Sanksi Ketujuh**

Pada tanggal 21 Juli 2022, Uni Eropa mengadopsi paket sanksi ketujuh untuk Rusia yang dimaksudkan untuk memperketat sanksi ekonomi yang menargetkan Rusia, menyempurnakan penerapannya, dan memperkuat keefektifannya. Sanksi ini meliputi larangan baru untuk membeli, menghimpur, atau mentransfer emas asal Rusia termasuk perhiasan, memperkuat kontrol ekspor barang penggunaan ganda, dan memperluas larangan akses pelabuhan yang ada menjadi penguncian akses. Kemudian pada tanggal 6 Oktober 2022. (*Timeline - EU Restrictive Measures against Russia over Ukraine*, n.d.)

### **Paket Sanksi Kedelapan**

Uni Eropa mengadopsi paket sanksi kedelapan yang meliputi batas harga terkait dengan transportasi laut minyak Rusia untuk negara ketiga, tambahan pada daftar barang-barang terlarang yang dapat berkontribusi pada peningkatan militer dan teknologi Rusia, dan pembatasan tambahan pada perdagangan dan jasa dengan Rusia. (*Timeline - EU Restrictive Measures against Russia over Ukraine*, n.d.) Pembatasan harga minyak Rusia akan membatasi lonjakan harga yang didorong oleh kondisi pasar yang luar biasa, dan secara drastis mengurangi pendapatan yang diperoleh Rusia dari minyak, setelah melepaskan penyerangan ilegal melawan Ukraina. Hal ini juga akan berfungsi untuk menstabilkan harga energi global sambil mengurangi dampak buruk pada pasokan energi ke negara ketiga. (*Russian Oil: EU Agrees on Level of Price Cap*, n.d.)

### **Paket Sanksi Kesembilan**

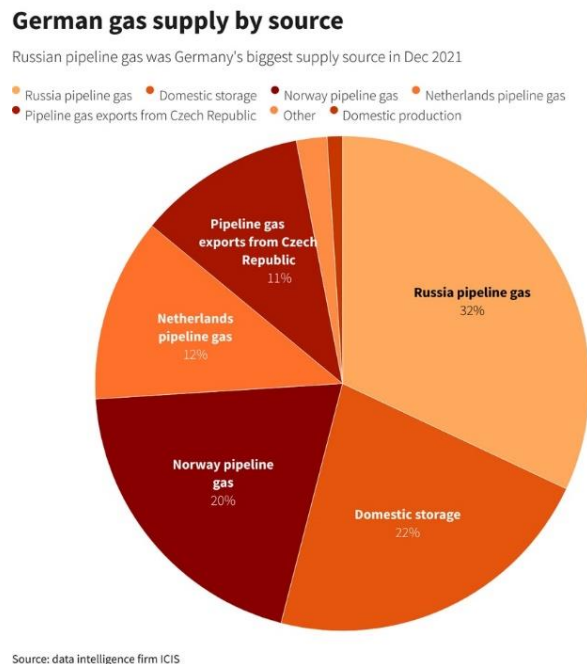
Pada 16 Desember 2022, Uni Eropa mengadopsi paket sanksi kesembilan untuk Rusia, menanggapi perang yang terus berlanjut melawan Ukraina dan gawatnya eksalasi saat ini terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil. Paket sanksi kesembilan ini meliputi larangan ekspor mesin drone, ekspor barang dan teknologi penggunaan ganda, larangan investasi di bidang pertambangan, larangan transaksi dengan *The Russian Regional Development Bank*, serta larangan penyediaan iklan, riset pasar, dan jajak pendapat publik. Uni Eropa juga telah menanggukuhkan lisensi penyiaran empat outlet Rusia tambahan dan telah memberikan sanksi tambahan kepada 141 individu dan 49 entitas. Ini merupakan sanksi terakhir yang diadopsi pada tahun 2022. (*Timeline - EU Restrictive Measures against Russia over Ukraine*, n.d.)

## **ANALISIS PENOLAKAN HUNGARIA ATAS SANKSI EKONOMI UNI EROPA TERHADAP RUSIA TAHUN 2022**

Pada tanggal 3 Juni 2022, Uni Eropa mengadopsi paket sanksi keenam sebagai tanggapan atas penyerangan yang dilakukan Rusia ke Ukraina pada hari Kamis 24 Februari 2022. Paket sanksi keenam ini meliputi larangan impor minyak mentah dan produk minyak sulingan dari Rusia dengan pengecualian terbatas, penambahan larangan SWIFT untuk tiga bank Rusia dan satu bank Belarusia, dan penangguhan penyiaran di Uni Eropa untuk tiga outlet milik negara Rusia lainnya. (*Timeline - EU Restrictive Measures against Russia over Ukraine*, n.d.)

Adanya larangan impor minyak mentah dan produk minyak sulingan dari Rusia, membuat negara lain tidak bisa mengimpor sumber energi apapun dari Rusia, dikarenakan pada paket sanksi kelima Uni Eropa telah melarang impor, batu bara, dan bahan bakar fosil padat lainnya yang berasal dari Rusia. Pada awal penerapan sanksi terdapat beberapa negara anggota Uni Eropa yang menolak menerapkan sanksi tersebut di negaranya termasuk Jerman dan Hungaria. (“Menguak Alasan Jerman-Hungaria Tolak Jatuhkan Sanksi Ke Rusia,” 2022) Pasalnya sebelum penyerangan Rusia ke Ukraina, jumlah suplai gas terbesar Jerman berasal dari Rusia. Berikut adalah data suplai gas Jerman berdasarkan sumbernya.

Gambar 1. Suplai Gas Jerman Berdasarkan Sumbernya



Sumber: Diambil dari artikel berita “reuters.com”.(Vera Eckert and Kate Abnett, 2022)

Berdasarkan hal ini, Jerman pada awalnya menolak keputusan penerapan sanksi tersebut, dengan mempertimbangkan peran gas yang menyumbang 15,3% dari pembangkit listrik Jerman tahun 2021, dengan memperhatikan jumlah populasi di Jerman yang mana menurut perkiraan pertama Kantor Statistik Federal, Jerman memiliki minimal 84,3 juta penduduk pada akhir tahun 2022.(*Current Population of Germany*, 2022) ini adalah jumlah penduduk tertinggi yang pernah tercatat pada akhir tahun. Pertumbuhan yang kuat disebabkan oleh rekor imigrasi bersih, dikarenakan Jerman menampung terlalu banyak pengungsi, disebabkan oleh tidak meratanya persebaran pengungsi di Uni Eropa.(Karjaya, 2022)

Kehilangan sebagian besar impor gas yang memerlukan peningkatan jangka pendek pada pembangkit berbahan bakar batu bara atau impor listrik dari negara tetangga. Situasi ini akan lebih akut pada penghangat rumah, dimana gas membuat separuh dari 41,5 juta rumah tangga di Jerman tetap hangat.(Vera Eckert and Kate Abnett, 2022) Namun ternyata masyarakat Jerman berpendapat agar pemerintah lebih mendahulukan sikap moral daripada kepentingan ekonomi, yang mana masyarakat Jerman berpikir bahwa jika Jerman tidak menuruti sanksi tersebut, negara ini telah membantu Rusia pada pembiayaan penyerangan terhadap Ukraina. Selain itu setelah AS dan Inggris memberlakukan larangan migas Rusia,

tekanan pada pemerintah Kanselir Jerman Olaf Scholz dan anggota G7 lainnya meningkat untuk mengikuti langkah kedua negara tersebut.(Detikcom, 2022)

Berbeda halnya dengan Jerman, Hungaria tetap menolak untuk menerapkan sanksi tersebut, Hungaria menegaskan tidak akan mendukung sanksi apapun yang menargetkan energi Rusia karena Hungaria sangat bergantung pada minyak dan gas Rusia dan mengatakan boikot minyak Uni Eropa akan merugikan dan menghancurkan pasokan energi yang stabil.(“Why Is Hungary Not Backing Eu Sanctions on Russian Oil?,” 2022)

Adanya penolakan yang dilakukan Hungaria kemudian menjadi permasalahan pada bulatnya keputusan Uni Eropa terkait penjatuhan paket sanksi yang merupakan pelarangan impor gas dan minyak mentah Rusia. Pasalnya pada keanggotaan Uni Eropa keputusan kebijakan luar negeri dan keamanan sebagian besar memerlukan persetujuan semua negara anggota Uni Eropa. Hal ini juga karena mekanisme pengambilan keputusan di Uni Eropa telah mapan, yaitu konsekuensi atas pengambilan keputusan yang ada telah diperhitungkan dan dapat dipertanggungjawabkan.(*Foreign and Security Policy*, n.d.)

### ***Keuntungan dan Kerugian Hungaria***

Sebagai *unitary actor* Hungaria akan berusaha untuk memilih keputusan yang akan memberikan manfaat terbesar yang diharapkan atau disebut juga “*subjective expected utility*”nya. Hal ini dilakukan dengan menggunakan seperangkat preferensi tertentu dan serangkaian kemungkinan pilihan yang tetap. *Subjective expected utility* sendiri merupakan utilitas subjektif yang diharapkan atau yang ingin dicapai oleh individu dalam hal ini Hungaria sebagai aktor kesatuan. Dalam prosesnya Hungaria kemudian melakukan evaluasi subjektif dari beberapa variabel yang ada yaitu, penawaran relaksasi dan berbagai opsi alternatif sebagai pengganti pasokan energi asal Rusia sehingga memungkinkan pengambilan keputusan dibawah resiko, nilai dan probabilitas.(Shanteau & Pingenot, 2014)

Evaluasi tersebut kemudian yang menghasilkan keputusan yang dianggap dapat memenuhi *subjective expected utility* nya, yaitu konsistensi Hungaria terhadap penolakan yang dilakukan atas sanksi ekonomi Uni Eropa untuk Rusia. Uni Eropa menawarkan berbagai opsi seperti relaksasi hingga akhir tahun 2024, dan penggantian pasokan gas Rusia dengan kembali menggunakan batu bara untuk sementara dan mengakses sumber gas baru yang berasal dari Laut Utara Norwegia. Meskipun analisis memprediksi persediaan gas di Laut Utara tersebut hampir habis, tetapi masih ada cara lain yang dapat menggantikan gas tersebut yakni penggunaan *Liquid Natural Gas* (LNG) atau gas alam cair, dan cara ini didukung penuh oleh Amerika Serikat. Selain itu Uni Eropa juga akan memperbaharui dan meningkatkan kapasitas energi nuklir mereka sebagai kebutuhan pembangkit, dan mengembangkan energi terbarukan. Namun hal ini tidak merubah keputusan Hungaria untuk menyetujui sanksi tersebut.(Jedrych, 2022)

Dengan konsistensinya Hungaria, telah berperan sebagai aktor negara rasional yang berusaha memaksimalkan *subjective expected utility* yang dimilikinya karena Hungaria memanfaatkan konsistensi penolakan tersebut dalam posisinya sebagai anggota tetap Uni Eropa. Yang mana hal ini dapat membuat Uni Eropa berkompromi dengan keputusannya, dan membuat pengecualian terhadap negaranya atas sanksi impor migas Rusia.Walaupun pengecualian yang ada berlaku hingga akhir tahun 2023, namun dalam kurun waktu ini Hungaria setidaknya dapat melakukan upaya-upaya seperti pemenuhan kilang minyak dengan menambah volume pasokan gas melalui kerjasama Hungaria dengan Gazprom via Turkstream



yang di sepakati pada tahun 2021 menjadi 5,8 juta meter kubik gas per hari ke Hungaria pada 31 Agustus 2022. ("Hungary Signs New Gas Deal with Gazprom," 2022)

Untuk saat ini pengecualian penerapan sanksi di Hungaria merupakan hasil maksimal yang dapat diraih Orban, karena Hungaria terpantau masih dan dapat berstatus menolak sanksi namun tidak termasuk dalam hitungan suara Uni Eropa, dan masih dapat mengakses migas impor dari Rusia. Pertimbangan pengecualian oleh Uni Eropa ini mengacu posisi Hungaria sebagai negara *landlock* yang tidak memiliki pelabuhan untuk menerima pengiriman minyak global dan harus bergantung pada jaringan pipa. Selain itu, program utama pemerintah Hungaria untuk mengurangi tagihan utilitas bergantung pada biaya bahan bakar fosil Rusia yang relatif rendah dan merupakan faktor utama yang mendasari dukungan politik dalam negeri Orban. ("Why Is Hungary Not Backing Eu Sanctions on Russian Oil?," 2022)

Mengubah Kilang minyak dan jaringan pipa Hungaria untuk memproses minyak dari sumber non-Rusia akan memakan waktu lima tahun dan membutuhkan investasi besar-besaran, dan hal itu akan semakin mendorong kenaikan harga minyak, sehingga menyebabkan penutupan infrastruktur dan pengangguran. Selain itu, terdapat juga aspek yang harus dijaga oleh Uni Eropa sebagai sebuah organisasi supranasional, seperti perekonomian Hungaria yang sangat bergantung pada pasokan migas Rusia, dimana 85% gas alam dan lebih dari 60% minyak Hungaria berasal dari Rusia. ("Why Is Hungary Not Backing Eu Sanctions on Russian Oil?," 2022)

Mengalirnya minyak melalui pipa Druzhba yang merupakan rute pemasok volume terbesar untuk negara-negara Uni Eropa juga telah merubah jalur pipa menjadi pusat sektor energi Eropa Tengah. Yang mana kemudian membangun seluruh ekosistem yang menopang ribuan pekerjaan langsung dan tidak langsung, tetapi pada saat yang sama menciptakan ketergantungan yang tinggi pada Rusia. (Vera Eckert and Kate Abnett, 2022)

Selain itu adanya *Trans-European Transport Network Policy* atau TEN-T, yang merupakan kebijakan jaringan transportasi yang berisi tentang penerapan dan pengembangan jaringan jalur kereta api jalan raya, jalur air internal Uni Eropa, rute pelayaran laut, pelabuhan, bandara dan terminal kereta api di seluruh Eropa. (*Trans-European Transport Network (Ten-T)*, n.d.) Hal ini kemudian menjadi penting untuk Uni Eropa dengan posisi Hungaria yang terletak di Eropa Tengah, dimana Budapest menjadi salah satu pelabuhan inti pada jalur air internal Uni Eropa. (Eu et al., 2013)

Terkait konsistensi penolakan Hungaria pada posisinya sebagai anggota tetap Uni Eropa, ketika sebuah negara kemudian tidak memiliki keselarasan dengan Uni Eropa, maka seharusnya negara tersebut akan dikenakan penangguhan hak-hak tertentu yang telah didapatkan dari statusnya sebagai anggota tetap Uni Eropa, dikarenakan tidak terdapat mekanisme pemecatan anggota pada organisasi tersebut. (*Treaty on European Union / Maastricht Treaty*, n.d.)

Namun sepertinya pemblokiran paket sanksi dapat digunakan sebagai pengungkit dalam konflik terpisah antara Budapest dan Uni Eropa. Yang mana blok tersebut telah menahan miliaran dana pemulihan pandemi virus corona dari Hungaria, atas maraknya kasus korupsi dan pelanggaran prinsip aturan hukum Uni Eropa terkait kemunduran nilai-nilai demokrasi dengan melakukan kontrol berlebihan atas peradilan. Mencekik kebebasan media dan menyangkal hak-hak LGBT. (Tidey, 2022)

Pemerintah Orban memang telah membantah tuduhan tersebut dan berpendapat bahwa hukuman Uni Eropa bermotivasi politik, tetapi dengan ekonomi Hungaria yang menurun di tengah tingginya inflasi dan defisit anggaran yang besar. Dibutuhkan uang Uni Eropa untuk pemulihan ekonomi, sehingga saat Uni Eropa bernegosiasi dengan Hungaria untuk mendapatkan dukungannya bagi sanksi terhadap energi Rusia, pencairan dana yang ditahan dapat berfungsi sebagai alat tawar menawar. ("Why Is Hungary Not Backing Eu Sanctions on Russian Oil?," 2022)

Hungaria yang sangat bergantung pada migas Rusia telah berulang kali mengatakan tidak akan menyetujui sanksi apapun terkait energi. Hal ini memang terkesan tidak adil bagi negara-negara yang juga memiliki ketergantungan yang tinggi pada impor migas Rusia, para pejabat Hungaria mengatakan mereka akan bekerja untuk meningkatkan infrastruktur yang nantinya memungkinkan Hungaria menerima lebih banyak minyak melalui jalur pipa alternatif dari Kroasia, dimana pada saat itu pengecualian Budapest dapat dihapuskan. (Justin Spike, 2022)

Namun banyaknya pelanggaran terkait nilai-nilai fundamental Uni Eropa yang dilakukan Hungaria sebagai anggota tetap, membuat negara-negara Uni Eropa menyuarakan penangguhan dana sejumlah 7,5 miliar euro. ("European Union: Suspend Funds to Hungary under the Conditionality Mechanism," 2022) Hal ini kemudian yang mengundang Viktor Orban kembali membuat pernyataan bahwa sanksi yang diberlakukan oleh Uni Eropa harus dicabut. Pernyataan ini dibuat pada pertemuan tertutup partai Viktor Orban pada tanggal 21 September 2022, hanya beberapa hari setelah Komisi Eropa menyerukan penghapusan 7,5 miliar euro dan Uni Eropa yang dialokasikan karena korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, menurunnya tingkat demokrasi dan nilai-nilai fundamental di Hungaria. ("Hungary's Orban Blames Eu's Russia Sanctions For Energy Crisis, Wants Them Scrapped," 2022)

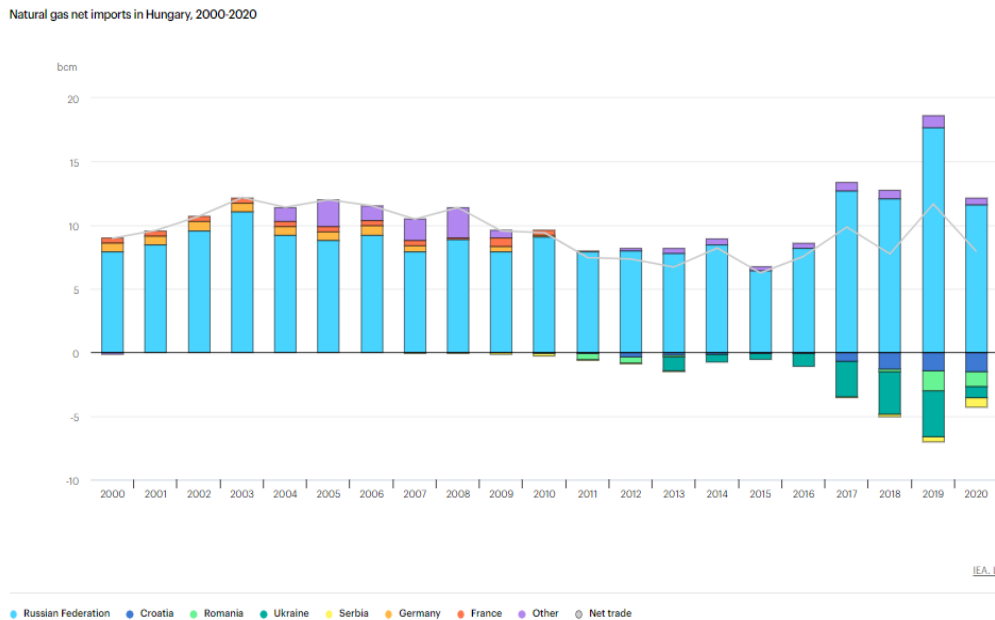
Orban mengatakan bahwa sanksi Uni Eropa telah menaikkan harga gas dan inflasi, sedangkan harga alami Uni Eropa telah mengalami kenaikan satu tahun sebelum Brussel memberlakukan sanksi terhadap Rusia, karena Gazprom dibawah kendali Kremlin mulai memotong ekspor gas alam ke blok tersebut tahun lalu, dan hal tersebut dianggap karena Rusia mengumpulkan lebih dari 100.000 pasukan siap tempur di perbatasan Ukraina. Setelah itu Rusia memangkas ekspor gas alam tahun 2022 sebagai konsekuensi Uni Eropa yang menjatuhkan sanksi terhadap ekonominya setelah invasi ke Ukraina. ("Hungary's Orban Blames Eu's Russia Sanctions For Energy Crisis, Wants Them Scrapped," 2022)

Orban juga mengklaim jika Uni Eropa bersedia mencabut sanksi energi yang ada, harga gas akan langsung turun hingga 50% begitu juga dengan tingkat inflasi. Hal ini juga dapat menghindarkan Eropa dari terjadinya resesi karena jelas-jelas sanksi ini lebih merugikan Uni Eropa daripada Rusia. Oleh karena itu, Hungaria lagi-lagi tidak dapat mendukung sanksi berikutnya yang direncanakan Uni Eropa terhadap Rusia, jika sanksi tersebut mengandung sanksi energi. Sedangkan Dewan Uni Eropa telah mengusulkan sanksi baru yang termasuk batasan harga minyak untuk negara ketiga. Meskipun Uni Eropa membutuhkan kebulatan suara untuk menjatuhkan sanksi, Orban mengatakan bahwa Hungaria telah melakukan banyak hal untuk mempertahankan persatuan Eropa, dan jika terdapat sanksi energi dalam paket yang akan dikeluarkan berikutnya, maka Hungaria tidak akan pernah mendukungnya. ("Hungary Cannot Support Any New EU Energy Sanctions against Russia - Govt," 2022)

Untuk mengukur seberapa rasional pilihan Hungaria sebagai *unitary actor*, preferensi Hungaria harus tunduk pada batasan tertentu, harus lengkap dan harus transitif contohnya jika A lebih disukai daripada B dan B daripada C, maka A lebih disukai daripada C. Melalui penjelasan dua sub bab, telah terlihat apa yang menjadi preferensi utama Hungaria yakni keamanan energi.(Walt et al., 2011) Jika dikatakan posisi Hungaria dalam keanggotaan Uni Eropa dapat terancam karena Hungaria adalah anggota tetap dari Uni Eropa yang seharusnya menyamakan suara dalam pengambilan keputusan luar negeri seperti yang tercantum dalam TEU, hal itu tidak akan terjadi karena dalam organisasi ini tidak ada prosedur pemecatan negara anggota, yang ada hanya penangguhan hak-hak tertentu. Namun adanya penangguhan ini telah dipatahkan, karena terdapat pengecualian untuk Hungaria dan beberapa negara lain di Eropa Tengah.(Treaty on European Union, 1992)

Berdasarkan jumlah impor migas Hungaria sejak tahun 2000 hingga 2022, jumlah impor gas Hungaria didominasi oleh pasokan gas yang berasal dari Rusia, sehingga akan sangat merugikan bagi Hungaria jika memilih keputusan untuk mendukung atau menyetujui dan kemudian menerapkan sanksi tersebut.

Gambar 2. Jumlah Impor Gas Hungaria Tahun 2000 - 2020



Sumber: Diambil dari website "IEA.org".("Hungary Natural Gas Security Policy," 2022)

Sehingga, dapat dipetakan apa saja yang menjadi keuntungan dan kerugian pada preferensi Rusia dalam rangkaian penolakan sanksi yang dilakukan terhadap Uni Eropa.

Tabel 1. Keuntungan dan Kerugian Hungaria

Keuntungan	Kerugian
<ul style="list-style-type: none"> <li>Menolak sanksi dan tetap mengimpor gas dari Rusia dengan batas waktu akhir tahun 2023 dan masih dapat melakukan upaya penolakan sebelum dan sesudah batas waktu tersebut.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penangguhan hak keanggotaan</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyetujui sanksi dengan relaksasi hingga tahun 2024</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Harus mengadopsi sanksi energi yang ada pada batas waktu tersebut</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyetujui sanksi dan menerapkannya serta menerima opsi alternatif pengganti pasokan gas Rusia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kelumpuhan ekonomi Hungaria</li> </ul>

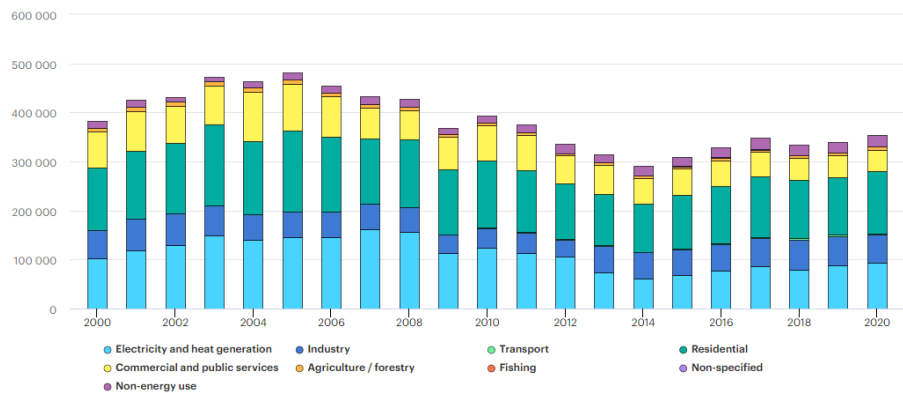
Melalui preferensi yang transitif ini, Hungaria sebagai *unitary actor* terlihat sangat mengabaikan posisi keanggotaannya di Uni Eropa demi kelangsungan hidup negaranya, meskipun pada kenyataannya untuk saat ini Hungaria dapat memanfaatkan posisi keanggotaan tersebut untuk berusaha memaksimalkan keuntungannya dengan memainkan penolakan dan konsisten dalam keputusannya. Hungaria lebih memilih pilihan Menolak sanksi dan tetap mengimpor gas dari Rusia dengan batas waktu akhir tahun 2023 dan masih dapat melakukan upaya penolakan sebelum dan sesudah batas waktu tersebut, dibandingkan dengan menyetujui sanksi dengan relaksasi hingga tahun 2024, atau menyetujui sanksi dan menerapkannya serta menerima opsi alternatif pengganti pasokan gas Rusia.

Hal ini karena Hungaria memilih pilihan yang memiliki resiko paling minim sebagai keputusan, dengan pilihan menolak secara konsisten sanksi ekonomi Uni Eropa atas invasi Rusia ke Ukraina. Yang mana dapat memaksimalkan keuntungan Hungaria dikarenakan adanya pengecualian penerapan sanksi ekonomi yang melarang impor migas Rusia, dan dengan resiko yaitu penangguhan hak yang dapat digunakan kembali untuk bahan tawar-menawar jika terdapat sanksi energi berikutnya oleh Hungaria pada Uni Eropa, maka dapat disimpulkan bahwa keputusan penolakan Hungaria terhadap sanksi Uni Eropa atas invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022, adalah pilihan yang rasional.

Dalam pengambilan keputusan penolakan terhadap sanksi ekonomi Uni Eropa atas Rusia pada tahun 2022, Hungaria memposisikan diri sebagai *unitary actor*. *Unitary actor* atau aktor kesatuan, merupakan entitas tunggal dalam hal ini negara yang mencoba untuk memaksimalkan kepentingan nasional yang didefinisikan secara luas. Kepentingan nasional pada konteks ini menyatukan kepentingan sosial dan politik dengan mengesampingkan perpecahan politik antara pemerintah dan masyarakatnya. (*The Unitary Actor Assumption*, n.d.)

Pemerintah Hungaria bersikeras memblokir proposal sanksi Uni Eropa yang mencakup energi Rusia, karena 85% gas alam dan lebih dari 60% minyak Hungaria berasal dari Rusia. Sejak pemerintahan Orban dimulai pada tahun 2010, ia telah memperdalam ketergantungan Hungaria pada energi Rusia dan mengatakan geografi dan Infrastruktur energinya membuat penutupan minyak Rusia tidak mungkin dilakukan. (“Why Is Hungary Not Backing Eu Sanctions on Russian Oil?,” 2022) Hal ini kemudian dapat dijelaskan melalui urgensi konsumsi gas Hungaria, yang mana dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4. 1 Presentasi Konsumsi Gas Hungaria Tahun 2000 - 2020



Sumber: Diambil dari website “IEA.org”. (“Hungary Natural Gas Security Policy,” 2022)

Gambar diatas merupakan jumlah konsumsi gas Hungaria yang di tampilkan berdasarkan sektor pemakaiannya dari tahun 2000 hingga tahun 2020, yaitu 2 tahun sebelum pemberlakuan sanksi ekonomi oleh Brussels. Dapat dilihat bahwa penggunaan gas untuk pembangkit listrik dan kebutuhan perumahan merupakan penggunaan terbanyak sepanjang 20 tahun, disusul layanan publik komersial, transportasi, dan digunakan juga sebagai kebutuhan pertanian dan penangkapan ikan. Maka jika Hungaria ikut menerapkan sanksi ekonomi yang melarang impor migas dari Rusia, ini sama saja dengan mengakhiri penghidupan di negaranya, karena hampir semua sektor di Hungaria memanfaatkan penggunaan gas sebagai penunjang. (“Hungary Natural Gas Security Policy,” 2022)

Tingkat ketergantungan Hungaria yang sangat tinggi pada gas Rusia membuat beberapa alternatif yang ditawarkan oleh Uni Eropa terlihat tidak masuk akal bagi Hungaria, yang mana Uni Eropa menawarkan untuk kembali ke penggunaan batu bara sementara, dalam upaya membatasi penggunaan gas alam. Namun kelemahan batu bara adalah bahan ini merupakan sumber energi paling kotor. Batu bara menyumbang sekitar 40% emisi gas rumah kaca global, namun kelebihan sumber energi ini tetap tersedia secara luas dan dapat langsung digunakan di pembangkit listrik yang ada. (Jedrych, 2022)

Selain itu Uni Eropa juga menyarankan pencarian sumber energi lain, saat sanksi diberlakukan, energi di Laut Utara Norwegia telah mengisi beberapa celah, Norwegia mengambil alih Rusia sebagai pemasok gas terbesar di Eropa setelah meningkatkan produksi menjadi 122 bcm pada tahun 2022, yang mengalami kenaikan dari produksinya tahun 2021. Norwegia juga pada akhir tahun 2022 mulai membuka pipa baru ke Polandia. (Jedrych, 2022)

Meskipun analis mengatakan strategi ini memiliki batas karena persediaan di Laut Utara Norwegia hampir habis, namun masih terdapat alternatif lain yaitu gas alam cair. Amerika serikat mengatakan akan meningkatkan ekspor gas alam cair ini menjadi 50 bcm per tahun pada tahun 2030 atau sekitar sepertiga dari pasokan gas yang sebelumnya disediakan oleh Rusia. Selain

itu produksi gas Mediterania Timur juga sedang mengalami perluasan, namun kendala terhadap hal ini jika terdapat lebih banyak gas alam cair yang angkut melalui jalur laut, maka dibutuhkan terminal impor pantai baru dan jaringan pipa distribusi, dan pembangunan fasilitas tersebut umumnya memakan waktu dua hingga tiga tahun.(Jedrych, 2022)

Alternatif lainnya yang dapat digunakan oleh negara-negara Uni Eropa adalah penggunaan nuklir. Prancis sendiri telah menggunakan nuklir hampir 70% sebagai penunjang listriknya, dan Jerman telah menggunakan pembangkit listrik tenaga nuklir dari tahun 1990 untuk menyelamatkan pabrik-pabriknya. Meskipun pada awalnya Jerman ingin menutup pembangkit nuklirnya, namun dikarenakan adanya sanksi impor migas asal Rusia, Jerman menunda penutupan tersebut setidaknya hingga 2023. Selain itu beberapa negara Uni Eropa seperti Spanyol, Finlandia, dan Swedia telah mulai meningkatkan kapasitas pembangkit nuklir di negaranya.("How Europe Can Cut Natural Gas Imports from Russia Significantly within a Year," 2022)

Namun penggunaan sumber energi nuklir secara besar-besaran akan menjadi tantangan tersendiri bagi penggunaannya, saat ini lebih dari separuh reaktor Prancis ditutup karena masalah pemeliharaan. Reaktor Jerman juga hanya mampu menyumbang 6% untuk pembangkit listriknya, namun jika negara ini ingin membangun reaktor baru, hal tersebut akan memakan waktu satu dekade, dan hanya Rusia yang menyediakan uranium dalam jumlah besar yang dapat mengoperasikan reaktor tersebut.(Jedrych, 2022)

## KESIMPULAN

Berdasarkan pertanyaan penelitian yaitu mengapa Hungaria menolak sanksi ekonomi Uni Eropa atas invasi Rusia ke Ukraina, maka dapat disimpulkan bahwa, Hungaria melakukan penolakan tersebut berdasarkan kepentingan sosial dan politik di negaranya terkait perekonomian nasional. Dikarenakan migas merupakan sumber daya yang menopang infrastruktur Hungaria dibawah pemerintahan Viktor Orban, dan Rusia merupakan pemasok terbesar untuk Hungaria sejak tahun 2000.

Penolakan Hungaria atas sanksi tersebut dilakukan demi memaksimalkan *subjective expected utility* atau utilitas yang diharapkan untuk mencapai keuntungan sebanyak-banyaknya, yang mana Hungaria juga menggunakan perilaku penolakan ini sebagai alat negosiasi dengan Uni Eropa terkait beberapa penangguhan dana yang dilakukan terhadap Hungaria atas kemunduran demokrasi dan banyaknya kasus korupsi di negara tersebut.

Perilaku penolakan Hungaria dapat dikatakan merupakan pilihan yang tepat, melihat adanya preferensi transtitif yang dimiliki Hungaria berdasarkan keuntungan dan kerugiannya, artinya Hungaria telah berhasil memanfaatkan situasi dan penolakan tersebut demi mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin, sehingga Hungaria dapat dikatakan sebagai aktor kesatuan yang rasional.

## REFERENSI

- Adoption and review procedure for EU sanctions.* (n.d.). European Council Council of The European Union. Retrieved May 23, 2023, from <https://www.consilium.europa.eu>
- Aida, N. R. (2022, September). Kenapa Rusia dan Ukraina Perang? *Kompas.Com*. <https://www.kompas.com/tren/read/2022/03/04>
- Amount contributed to the budget of the European Union in 2020, by member state.* (2021).

- Statista. <https://www.statista.com>
- Anjani, V. (2017). Konsistensi Kebijakan Polandia terhadap Sanksi Uni Eropa terhadap Rusia pada tahun 2014. *Jurnal Hubungan Internasional*, 10(1), 52. <https://doi.org/10.20473/jhi.v10i1.4390>
- Asmarini, W. (2022, March 9). Seberapa Besar Candu Dunia pada Minyak Rusia? Cek Faktanya. *Cnbc Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/news>
- Azmi, A. (2016). *Penolakan Yunani dalam perpanjangan sanksi uni-eropa terhadap Rusia Tahun 2014-2015*. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle>
- Bank profile*. (n.d.). Eurasian Development Bank. Retrieved March 4, 2023, from <https://eabr.org/en/about/>
- Biro Marianna, K. Z. (2019, February). Putin's bank moves to Budapest, gets all conceivable privileges and immunities. *Index*. <https://index.hu/english/2019/02/20>
- Cooperation with Hungary*. (n.d.). Rosatom. Retrieved March 1, 2023, from <https://rosatom-centraleurope.com/rosatom-in-country/history-of-cooperation/hu/>
- Creswell, J. W. (2009). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (3rd ed.). Sage Publications, Inc. <https://www.pdfdrive.com>
- Current population of Germany*. (2022). Destatis. <https://www.destatis.de/EN/Themes/Society-Environment/Population/Current-Population>
- Detikcom, T. (2022, March 10). Tolak Larangan Migas Rusia, Jerman Didesak Warganya Ubah Sikap. *Detiknews*. <https://news.detik.com>
- Druzhba Pipeline*. (n.d.). International Association of Oil Transporters. Retrieved March 4, 2023, from <https://www.iaot.eu/en/oil-transport/druzhba-pipeline>
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (M. Dr. Muhadjir Darwin (Ed.); 2nd ed.). Gadjah Mada University Press.
- EU adopts package of sanctions in response to Russian recognition of the non-government controlled areas of the Donetsk and Luhansk oblasts of Ukraine and sending of troops into the region*. (n.d.). European Council. Retrieved March 5, 2023, from <https://www.consilium.europa.eu>
- EU sanctions against Russia explained*. (n.d.). European Council Council of The European Union. Retrieved January 19, 2023, from <https://www.consilium.europa.eu>
- Eu, T. R. T., Regulation, T., Deal, E. G., Ten-t, T., Corridors, E. T., Corridors, C. N., Corridors, R. F., Corridors, E. T., & Regulation, T. (2013). *Ten-t Revision -Hungary*. 1–9.
- European Union: Suspend funds to Hungary under the conditionality mechanism. (2022, December). *Fidh*. <https://www.fidh.org>
- Factbox: Europe's alternatives if Russia shuts off gas supply. (2022, October). *Reuters*. <https://www.reuters.com>
- Foreign and Security Policy*. (n.d.). European Union. Retrieved February 16, 2023, from <https://european-union.europa.eu>
- Founding agreements*. (n.d.). European Union. Retrieved October 18, 2023, from <https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/principles-and-values>
- Hanifah, U. R. N. M. (2017). Embargo Ekonomi sebagai Strategi Konfrontasi Uni Eropa terhadap Rusia pada Masa Konflik Ukraina 2013-2015. *Jurnal Sosial Politik*, 3(2), 1. <https://doi.org/10.22219/sospol.v3i2.5063>
- Hartono, B. (n.d.). *Analisa Teori Pilihan Rasional Mengenai Sikap Abstain Indonesia Dalam*

- Perjanjian Perdagangan Senjata (Arms Trade Treaty/Att) Tahun 2013.* 5–6. <https://s.id/1wgWz>
- How Europe can cut natural gas imports from Russia significantly within a year. (2022, March 3). *Iea.Org*. <https://www.iea.org/news>
- Hungary's Orban Blames Eu's Russia Sanctions For Energy Crisis, Wants Them Scrapped. (2022, September 22). *RadioFreeEurope RadioLiberty*. <https://www.rferl.org>
- Hungary cannot support any new EU energy sanctions against Russia - govt. (2022, September 3). *Euronews*. <https://www.euronews.com/2022/09/30>
- Hungary Natural Gas Security Policy. (2022, August). *Iea*. <https://www.iea.org>
- Hungary signs new gas deal with Gazprom. (2022, August). *POLITICO*. <https://www.politico.eu/article/>
- International Bank for Economic Cooperation. (n.d.). *Britannica*. <https://www.britannica.com/place/East-Germany>
- Jedrych, J. (2022, December). The EU Needs Alternatives to Russian Energy. Here's the Plan. *Council on Foreign Relations*. <https://www.cfr.org>
- Justin Spike, S. P. (2022, May 10). Explainer: Why is Hungary blocking sanctions on Russian oil? *Ap News*. <https://apnews.com>
- Kahar, E. K. (2019). *Penolakan Serbia terhadap Himbauan Uni Eropa Untuk Turut Menjatuhkan Sanksi ke Rusia Tahun 2014-2018*. <https://repository.uinjkt.ac.id>
- Kardas, S. (2023, February). Conscious uncoupling: Europeans' Russian gas challenge in 2023. *European Council of Foreign Relations*. <https://ecfr.eu/article/>
- Karjaya, L. P. (2022). Upaya Uni Eropa (UE) Dalam Menangani Krisis Pengungsi Di Kawasan Uni Eropa. *Journal of Innovation Research and Knowledge, Vol.2, No., 2289*. <https://bajangjournal.com/index.php/JIRK/article/view/3682>
- Kate Abnett, J. S. and I. M. (2022, June 1). Eu agrees Russia oil embargo, gives Hungary exemptions; Zelenskiy vows more sanctions. *Reuters*. <https://www.reuters.com>
- Kraemer, R. (2021). *Orban's Hungary: A Russia and China Proxy Weakening*. <https://europeanvalues.cz/wp-content/uploads/2022/01>
- Marsa, M. (2016). *Penolakan Turki terhadap Himbauan Uni Eropa Untuk Turut Menjatuhkan Sanksi ke Rusia Pada Tahun 2014*.
- Menguak Alasan Jerman-Hungaria Tolak Jatuhkan Sanksi ke Rusia. (2022, March). *Cnn Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi>
- Morrow, S. (2021, August). Gazprom strikes deal with Hungary to export gas through TurkStream. *AA Energy*. <https://www.aa.com.tr>
- Russian oil: EU agrees on level of price cap.* (n.d.). European Council. Retrieved March 5, 2023, from <https://www.consilium.europa.eu>
- Shanteau, J., & Pingetot, A. M. (2014). " Subjective Expected Utility Theory " Prepublication Version of: " Subjective Expected Utility Theory ." *Encyclopedia of Medical Decision Making, June*.
- Sorensen, R. J. & G. (2009). *Pengantar Studi Hubungan Internasional* (2nd ed.). Pustaka Pelajar.
- The Unitary Actor Assumption.* (n.d.). Game Theory 101. Retrieved March 7, 2023, from <http://gametheory101.com>
- Tidey, A. (2022, September 19). Brussels calls for €7.5 billion EU funding cut from Hungary over



rule of law concerns. *Euronews*. <https://www.euronews.com>

*Timeline - EU restrictive measures against Russia over Ukraine*. (n.d.). European Council. Retrieved March 1, 2023, from <https://www.consilium.europa.eu/en/policies>

*Trans-European Transport Network (Ten-t)*. (n.d.). European Commission. Retrieved February 15, 2023, from <https://transport.ec.europa.eu>

Treaty on European Union. (1992). *Europos Sąjungos sutartis. Oficialus Europos Bendrijos Žurnalas*, 35(C 191), 1–112.

*Treaty on European Union / Maastricht Treaty*. (n.d.). European Parliament. Retrieved June 16, 2022, from <https://www.europarl.europa.eu>

TurkStream Pipeline. (n.d.). *Ns Energy*. <https://www.nsenergybusiness.com/projects>

Uni Eropa Sepakat Jatuhkan Sanksi Ekonomi ke Rusia. (2022, February). *Cnn Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi>

Végh, Z. (2015). Hungary's "Eastern Opening" policy toward Russia: ties that bind? *International Issues & Slovak Foreign Policy Affairs*, XXIV, 46.

Vera Eckert and Kate Abnett. (2022, February). Factbox: How dependent is Germany on Russian gas? *Reuters*. <https://www.reuters.com>

Walt, S. M., Walt, M., Art, R., Desch, M., Downs, G., Gartzke, E., Glaser, C., Grieco, J., Jervis, R., Mearsheimer, J., Posen, B., Snyder, J., & Evera, S. Van. (2011). *Rigor or Rigor Mortis? Stephen*. 23(4), 5–48.

Why is Hungary not backing EU sanctions on Russian oil? (2022, May 10). *Aljazeera*. <https://www.aljazeera.com/news/2022/5/10/>

Wittkopf, C. W. K. J. and E. R. (1989). *World Politics: Trend and Transformation* (L. Swanson (Ed.); 3rd ed.). St. Martin Press. <https://archive.org/details/worldpoliticstre00kegl>